

RINGKASAN EKSEKUTIF

INTERAKSI BUDAYA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME OLEH POLRI GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI

(Hasil penelitian oleh Sespim Polri tahun 2006)

Determinasi kebudayaan ditentukan oleh faktor-faktor geografis, demografis, sosial ekonomi, ideologi politik, sosial budaya, dan kondisi keamanan. Kondisi determinasi kebudayaan Indonesia saat ini memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai pulau yang dikelilingi lautan, memiliki dataran rendah dan tinggi yang cukup luas, udara tropis yang diametral antar musim hujan dan musim kemarau telah membentuk karakter-karakter manusia Indonesia yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah. Namun kondisi geografis yang sangat luas ini yang berbatasan dengan beberapa negara belum seluruhnya terjaga dan terpelihara sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Masih terdapat pulau-pulau yang tidak bernama dan terpencil dengan batas-batas dengan Negara lain yang tidak jelas.
- 2) Penduduk Indonesia yang besar dan plural dimana memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan (SARA) memiliki sub-sub kebudayaan yang sangat besar dan potensial bagi upaya membangun kebudayaan nasional.
Namun kondisi saat ini (10 tahun terakhir) menunjukkan timbulnya gejala konflik yang bernuansa SARA pada masyarakat Indonesia, yang ditenggarai disebabkan karena prasangka-prasangka budaya yang bertali-temali dengan munculnya deprivasi pada masyarakat, serta belum selesainya pembangunan karakter bangsa (*national character building*).
- 3) Kondisi sosial ekonomi sejak terjadinya krisis multidimensional masih belum sepenuhnya bangkit, masih menyisakan banyak penduduk yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dan banyaknya pengangguran. Sementara kesenjangan ekonomi masih terlalu besar di kalangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini telah menciptakan deprivasi pada masyarakat baik deprivasi absolut maupun deprivasi relatif, yang banyak menumbuhkan konflik-konflik sosial psikologi di dalam kehidupan

masyarakat, dan telah menumbuhkan sikap dan perilaku kekerasan.

- 4) Kondisi ideologi bangsa Indonesia saat ini, sekalipun secara resmi dinyatakan ideologi Pancasila, namun sebenarnya telah mengalami polarisasi. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan bukan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, melainkan ideologi lain, baik secara resmi dicantumkan pada partai-partai politik, maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pergerakan-pergerakan yang tidak berbentuk (organisasi tanpa bentuk). Kondisi ini telah memunculkan dinamika pada upaya mewujudkan ideologi tersebut. Sementara itu dinamika Politik Indonesia sejak munculnya gerakan reformasi mengarah pada terciptanya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta desentralisasi dalam pengelolaan negara. Namun demikian pada masa transisi dimana masyarakat belum memahami benar makna demokrasi, kondisi ekonomi yang masih terpuruk yang berakibat pada timbulnya deprivasi pada masyarakat, rendahnya kondisi sosial (pendidikan dan kesehatan) sebagaimana tercermin pada wilayah-wilayah penelitian (Propinsi Lampung, Banten, DKI Jaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) telah menimbulkan deviasi dan berbagai akses pada pelaksanaan demokrasi, yang berdampak pada munculnya perilaku antara lain: pengutamaan kepentingan individu dan kelompok, muncul konflik-konflik dan kekerasan pada masyarakat.
- 5) Kondisi sosial masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin pada ke 6 Propinsi wilayah penelitian, sejak terjadinya krisis multidimensional telah mengalami penurunan, baik pada pendidikan (banyaknya anak yang putus sekolah), kesehatan (gizi buruk, flu burung, dan lain-lain) sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin rendah. Pada saat ini sekalipun secara perlahan menunjukkan kenaikan, namun belum sepenuhnya meningkat, masih relatif banyak masyarakat yang buta huruf, dan kualitas kesehatan yang buruk.
- 6) Sementara itu nilai-nilai budaya yang terdapat pada berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan golongan

yang ada di Indonesia pada dasarnya masih memiliki budaya adiluhung sebagai sumber nilai sosial budaya nasional Indonesia sebagaimana tercermin pada 6 wilayah penelitian, seperti budaya gotong royong, budaya cinta kasih, budaya kebersamaan, budaya persatuan. Namun beberapa nilai budaya, telah banyak dilupakan, tidak dikenali masyarakat pendukungnya, bahkan telah mengalami pendangkalan (*degradasi*) makna, yang disebabkan adanya penetrasi budaya lain yang secara perlahan namun sistematis telah mengubah perilaku (budaya) masyarakat Indonesia kearah yang berlainan dengan budaya asli yang adiluhung, seperti individualisme, eksklusifisme, fanatisme, kekerasan.

- 7) Kondisi keamanan pasca keruntuhan Orde Baru yang ditandai dengan terjadinya krisis multidimensional mengalami titik nadir; berbagai kerusuhan hampir terjadi di seluruh belahan nusantara, serta pada beberapa daerah timbul separatisme yang menuntut kemerdekaan dan otonomi daerah. Sementara gerakan reformasi yang mengusung pembaharuan telah menyebabkan berbagai perubahan yang memerlukan penyesuaian dan berakibat timbulnya anomali pada masyarakat dan beberapa kelembagaan kenegaraan termasuk aparat keamanan. Kondisi ini telah mengakitnya munculnya berbagai permasalahan sosial, serta tindak kejahatan baik yang bersifat konvensional, maupun transnasional.
- 8) Selain faktor-faktor determinasi kebudayaan Indonesia yang mulai mengalami perubahan atau yang sering pula disebut sebagai faktor perubahan lingkungan strategis nasional, terdapat pula beberapa faktor Internasional (lingkungan strategis global), yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perubahan peta budaya yang menimbulkan munculnya persaingan peradaban pasca selesainya perang dingin, dimana Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dianggap sebagai agen tunggal penyebar peradaban internasional, khususnya budaya kapitalis liberal.
 - a. Hasil penelitian menunjukkan kondisi faktor-faktor determinasi budaya tersebut telah membentuk sub-sub budaya baik yang mendorong terhadap tindak kekerasan sebagai ciri dan karakteristik terorisme maupun nilai-nilai budaya yang dapat digunakan sebagai konduktor dinamik dalam mencegah timbulnya terorisme.
 - b. Kondisi faktor-faktor determinasi budaya yang mulai menurun telah dimanfaatkan oleh kelompok terorisme guna mewujudkan kepentingannya, dengan melakukan *interaksi budaya baik secara sendiri-sendiri pada faktor determinasi tersebut maupun secara akumulasi yang dapat dijadikan alasan tindakan-tindakan terorisme, ataupun dalam upaya membangun kekuatan agar paham-paham yang tebarkan terorisme diterima bangsa Indonesia*. Hal ini dapat tercermin dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang diyakini

responden sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia, dan sub-sub kebudayaan dianggap sebagai area kondisioning yang dijadikan sarana untuk memudahkan penerapan paham dan pergerakan terorisme di Indonesia.

- c. Beberapa faktor yang dikemukakan responden yang diyakini sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya terorisme di Indonesia, yakni :
 - 1) Disebabkan karena adanya kepentingan individu dan kelompok para pelaku (Rata-rata = 3,0467, Std Dev = 0,90726). Responden meyakini bahwa para teroris memiliki kepentingan individu maupun kelompok, alasan-alasan ketidakadilan, penindasan sebagai alasan solidaritas terhadap sesama kaum hanyalah alasan untuk mengalihkan perhatian dari kepentingan yang sesungguhnya seperti kepentingan politik (63%).
 - 2) Berkaitan dengan upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan oleh suatu kelompok tertentu. Hal ini disampaikan oleh sebagian responden, namun sebagian besar lainnya menyatakan sebaliknya dan menjadi bahan pertentangan sebagaimana diperlihatkan oleh nilai Standar Deviasi yang sangat tinggi (Rata-rata = 2,5703, nilai Std. Deviasi = 1,36764).
 - 3) Adanya fanatisme sekelompok orang terhadap aliran agama tertentu atau kepercayaan yang mereka anut. (Rata-rata = 2,9180 Std. Deviasi = 0,94690). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fanatisme kelompok telah menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama. Penafsiran terhadap ajaran agama yang keliru sering menimbulkan kesesatan yang berdampak pada munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang dari pandangan masyarakat pada umumnya.
 - 4) Teror yang terjadi di Indonesia disebabkan sebagai protes atas ketidakadilan (kesemenamaan) pihak-pihak lain di luar Pemerintah RI (Rata-rata = 3,0926 Std. Deviasi = 1,37675). Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sering dijadikan alasan melakukan teror di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki hubungan dengan Amerika dan Sekutunya, serta terdapatnya beberapa kepentingan Amerika dan Sekutunya di wilayah tersebut.
 - 5) Disebabkan karena adanya kekhawatiran atas perubahan budaya yang cenderung menuju kepada terciptanya budaya kapitalis liberal (Rata-rata = 3,0899. Std. Deviasi = 0,95297). Perlawanan atas kekhawatiran terhadap

perubahan budaya ke arah budaya kapitalis liberal dilakukan kelompok teroris melalui metode teror.

- 6) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung melakukan tindakan kekerasan dapat memudahkan penyebaran paham terorisme di kalangan masyarakat (Rata-rata = 2,9793. Std. Dev = 0,93745).
- e. Keenam faktor pendorong tersebut satu sama lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya terorisme di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor tersebut, yang secara bersama-sama mendorong munculnya terorisme di Indonesia.
- f. Selain faktor-faktor yang dapat mendorong munculnya perilaku teroris dalam masyarakat Indonesia, terdapat pula faktor-faktor budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia diyakini responden memudahkan munculnya terorisme di Indonesia, yakni :
 - 1) Tindakan terorisme yang dilakukan para teroris menurut sebagian responden disebabkan adanya budaya kekerasan dalam masyarakat (Rata-rata = 2,8746. Std. Dev = 0,94145). Kekerasan yang muncul di masyarakat, memberikan spirit pada munculnya tindakan terorisme. Kekerasan yang muncul bukan karena faktor nilai budayanya melainkan pemakaian terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang keliru. Penyimpangan terhadap nilai budaya disebabkan karena pemahaman yang belum sempurna sebagai akibat proses pembelajaran tidak tuntas. Hal ini menunjukkan dalam hal seseorang memutuskan untuk mengikuti paham teror atau bertindak melakukan teror, tidak seluruhnya didorong oleh faktor-faktor budaya, bahkan yang terbesar adalah pengaruh dari lingkungan sekitar budaya tersebut. Ini yang menunjukkan adanya disparitas dalam penerimaan paham-paham.
 - 2) Sikap dan perilaku masyarakat yang bersifat individualistis menyebabkan para teroris dengan mudah bersembunyi, dan melakukan pergerakan (Rata-rata = 3,2365. Std. Dev = 0,92256). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok teroris banyak melakukan pergerakan/aksinya dan persembunyiannya pada daerah-daerah/wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki sikap dan perilaku individual.
 - 3) Masyarakat yang bersifat tertutup (eksklusif) dapat memudahkan kelompok paham terorisme yang menggunakan tindak kekerasan berkembang di masyarakat (Rata-rata = 3,3267. Std. Dev = 0,91531). Hasil penelitian menun-

jukan bahwa paham-paham terorisme banyak berkembang pada masyarakat yang bersifat tertutup (eksklusif), serta masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok yang bersifat tertutup.

- 4) Proses pembelajaran yang sama dan intens dapat melahirkan kesadaran yang sama tentang sesuatu yang diyakini dan dipahami, sehingga mudah dibelokkan untuk kepentingan tindakan terorisme (Rata-rata = 3,1814. Std. Dev = 0,94594). Hasil penelitian menunjukkan kelompok terorisme terbentuk bukan hanya dalam hitungan jam atau hari, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran, dan melalui beberapa tahap metode pembelajaran.
- 5) Sistem kekerabatan di kalangan masyarakat menurut sebagian besar responden sering dimanfaatkan untuk mempermudah proses rekrutmen bagi anggota suatu jaringan teroris, akan tetapi hal ini menjadi sesuatu yang dipertentangkan oleh para responden sebagaimana diperlihatkan oleh nilai Standar Deviasi yang sangat tinggi (Rata-rata = 3,0203. Std. Dev = 1,35101).
- 6) Kondisi lingkungan serta latar belakang ideologi yang sama menurut sebagian responden dapat membentuk kelompok-kelompok eksklusif (tertutup) yang berkembang menjadi kelompok teroris (Rata-rata = 2,9940. Std. Dev = 0,93998). Responden meyakini bahwa teroris berkembang di Indonesia pada kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang ideologi yang sama. Ideologi adalah sesuatu pandangan yang diyakini oleh kelompoknya sesuatu yang benar, oleh karena itu harus diperjuangkan. Pandangan tersebut menyangkut :
 - a) Prinsip-prinsip hidup yang fundamental.
 - b) Prinsip-prinsip kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan hukum, seperti sistem ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum.
 - c) Prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti sistem pemerintahan.
 - d) Strategi dan Metode untuk mencapai tujuan.Di Indonesia, terdapat kemiripan ideologi yang dianut kelompok terorisme dengan kelompok yang akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Oleh karena itu banyak anggota NII yang terlibat teror.
- 7) Ikatan darah (*genealogis*) sering diperguna-

kan untuk membentuk kelompok guna kepentingan para teroris. (Rata-rata = 2,8509. Std. Dev = 0,93753). Hasil penelitian menunjukkan banyak warga negara Indonesia yang terlibat kelompok teroris memiliki ikatan darah satu sama lain baik melalui perkawinan atau langsung.

- 8) Ikatan emosional yang menggunakan kedok agama menurut para responden sangat mudah dijadikan sarana untuk mengembangkan paham dan aksi teror di dalam masyarakat (Rata-rata = 3,0424. Std.Dev = 0,93044). Hasil penelitian menunjukkan faktor solidaritas keagamaan merupakan faktor yang sangat kuat digunakan kelompok teroris yang ada di Indonesia untuk mengembangkan penyebaran paham-pahamnya. Hal ini mengingat agama merupakan keyakinan yang bersifat dogmatis, sehingga sensitivitas agama sangat kuat bagi para pemeluknya.
- 9) Situasi dan kondisi yang sama (dalam kemiskinan, kesedihan, kekalutan, tekanan, kekurangan, kesusahan, kekecewaan, dan lain-lain) memudahkan menjadi pemersatu/perekat guna menerima paham teror dan mengikuti kemauan kelompok teroris (Rata-rata = 3,2541. Std. Dev = 0,92632). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari sisi ekonomi, banyak warga negara Indonesia yang terlibat kelompok teroris merupakan kelompok masyarakat yang terkatagori miskin, dengan memiliki deprivasi (kekecewaan), kesedihan, kesusahan yang sama satu sama lain.
- g. Berbagai faktor yang mendorong munculnya terorisme, serta nilai-nilai sosial budaya yang mempermudah sebagaimana diuraikan di atas memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penanggulangan terorisme. Hasil uji statistik menunjukkan faktor-faktor tersebut berkorelasi terhadap upaya-upaya penanggulangan tindakan terorisme sebesar 72,4%. Hal ini menunjukkan, bahwa efektivitas upaya-upaya penanggulangan terorisme di tanah air akan sangat ditentukan oleh seberapa efektif faktor-faktor yang menjadi prediktor bagi munculnya gerakan atau kegiatan terorisme tersebut dilakukan.
- h. Di dalam masyarakat Indonesia yang berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan sebagai tercermin dari hasil penelitian pada 6 propinsi, terdapat nilai-nilai budaya yang adiluhung yang dapat dijadikan pedoman untuk menata kembali perilaku, dan diyakini responden dapat digunakan sebagai daya tolak dan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi paham terorisme, yakni:
 - 1) Budaya persaudaraan dapat dijadikan sarana

untuk menanamkan penolakan masyarakat terhadap terorisme (Rata-rata = 3,4890. Std. Dev = 0,90286). Budaya persaudaraan hampir dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia, seperti suku bangsa Lampung memiliki prinsip budaya persaudaraan yang tercermin pada prinsip-prinsip *Falsafah Piil Pesengiri* yang terdiri dari : *Piil Pesengiri (Prinsip kehormatan)*, *Bejuluk Adek (Prinsip Keberhasilan)*, *Nemui Nyimah (Prinsip Penghargaan)*, *Nengah Nyappur (Prinsip Persamaan)*, *Sakai Sambalan (Prinsip Kerjasama)*. Pada suku Banten yang penduduknya terdiri dari suku sunda (baduy) dan suku Jawa Serang, terdapat prinsip-prinsip "*Ngajaga dulur, ngajaga batur*", *silih asih dan silih asuh*. Pada masyarakat Jawa (Jawa Tengah dan Timur) terdapat prinsip "*tuna satak bathi sanak*" (rugi uang sedikit tidak apa-apa, tetapi mendapatkan teman). Begitu pula pada masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja), seperti pada prinsip '*yang Siri*' ialah orang yang selalu teliti tutur bahasa, dan halus kepada sesamanya.

- 2) Rasa persatuan dan kesatuan yang berkembang dengan baik dapat dijadikan sarana untuk memperlambat gerakan dalam menghadang serta mengeliminasi gerakan terorisme (Rata-rata = 3,4672. Std. Dev = 0,88549). Nilai-nilai ini pada masyarakat Lampung sudah tertanam sejak lama sebagaimana tercermin pada prinsip "*Khepot Delom Mufakat*", begitu pula pada masyarakat Banten terdapat rasa persatuan dan kesatuan pada istilah "*sauyunan jeung nu salembur*". Sementara pada masyarakat Jawa terlihat pada ungkapan "*mangan ora mangan waton kumpul*". Pada masyarakat Sulsel pada tercermin pada makna Siri' "*tu mate-nisantangi*" yang berarti Keteguhan diri dan keteguhan bersama. Oleh karena itu perlu terus dipupuk dan direvitalisasi beserta kelembagaannya.
- 3) Pemberian pemahaman yang baik terhadap agama akan mampu menangkal/menolak paham terorisme (Rata-rata = 3,7818. Std. Dev = 0,87340).

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa karakteristik terorisme yang ada di Indonesia termasuk pada kelompok religius. Oleh karena itu isue agama menjadi sangat kuat, agama sering dijadikan tameng, atau alasan pembenaran melakukan teror.

Untuk itu membudayakan memahami agama dengan benar menurut responden meru

pakan hal yang sangat penting. Dari nilai yang diberikan responden menunjukkan bahwa responden hampir dipastikan sangat sepakat bahwa pemahaman masyarakat akan agamanya masih kurang, oleh karena itu peningkatan pemahaman agar dengan baik harus segera diwujudkan dalam upaya menangkal tumbuhnya terorisme di Indonesia.

- 4) Rasa persamaan sebangsa dan setanah air dapat dijadikan sarana untuk menangkal/menolak terorisme (Rata-rata = 3,8100 . Std. Dev = 0,89009). Pada masyarakat Lampung tercermin pada prinsip "*Tetengah Tetengah*". Prinsip ini harus terus dikembangkan dan direvitalisasi, agar dapat dimanfaatkan guna menangkal tumbuhnya paham terorisme di wilayah Lampung, Begitu pula pada prinsip orang Banten "*Ngajaga dulur, ngajaga batur, jeung ngajaga lembur*". Pada masyarakat Jawa terdapat watak "*eling marang kanca lara lapa*" (ingat pada sesama seperjuangan), juga pada pepatah "*manjing ajur-ajer*". dan prinsip keteguhan hati pada *Siri*' (Sulsel). Persamaan sebangsa dan setanah air harus terus dipertahankan, terlebih pada kondisi saat ini mulai menguatnya kembali nilai-nilai primordialisme.
- 5) Rasa kasih sayang sesama manusia dapat dijadikan sebagai sarana penting untuk menangkal/menolak terorisme (Rata-rata = 3,8888. Std. Dev = 0,87335). Pada masyarakat Lampung terlihat pada kata-kata "*Nemui Nyimah dan Bepudak Waya. Nemui Nyimah, Sakai Sambaian dan Khepot Delom Mufakat*, Pada masyarakat Banten tercermin pada kata "*Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh*" cukup memberikan gambaran masih eksis keberadaannya. Begitupula pada masyarakat Jawa istilah "*berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta*" (berbudi luhur serta mulia dan bersifat adil terhadap siapa saja, atau adil dan penuh kasih sayang). Namun demikian perlu terus dipupuk.
- 6) Peran Para Tokoh Masyarakat dapat dijadikan sebagai sarana guna menggalang pemahaman dalam upaya penanggulangan terorisme (Rata-rata = 3,7045 . Std. Dev = 0,87470). Indonesia sangat kaya dengan berbagai ragam suku bangsa, dan pada berbagai ragam suku bangsa tersebut terdapat orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin atau yang ditokohkan sebagai pemimpin informal, dengan segala kelembagaannya, di samping pemimpin formal pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan negara.
- 7) Nilai nilai sosial budaya disampaikan oleh pa-

ra responden di seluruh wilayah penelitian secara umum dapat dijadikan sarana guna menciptakan pemahaman yang sama dalam menanggulangi kegiatan terorisme (Rata-rata = 3,8145 . Std. Dev = 0,88382). Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, pada dasarnya sangat kaya dan plural. Tidak ada satu pun di dunia yang memiliki kekayaan budaya sekomplit Indonesia, mulai didasarkan para keragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, agama, dan berbagai golongan penduduk. Potensi sosial budaya ini sangat tinggi bila dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menanggulangi terorisme, mengingat nilai-nilai sosial budaya kita, mengandung prinsip-prinsip kedamaian, ramah tamah, sopan santun, dan lain-lain menunjukkan kuatnya ikatan sosial budaya Indonesia.

- 8) Perilaku gotong royong yang berkembang dengan baik menurut para responden dapat dijadikan sarana untuk membangkitkan semangat menjaga keamanan bersama dalam kerangka penanggulangan terorisme (Rata-rata = 3,8483 . Std. Dev = 0,87064).

Sebagian besar responden mengakui bahwa perilaku gotong royong masih ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pada beberapa daerah pedesaan di Indonesia perilaku gotong royong ini masih tetap dipelihara. Di Lampung tercermin pada kata *Sakai Sambaian/Khepot Delom Mufakat*, di Banten tercermin dalam bahasa sunda "*Silih asuh*" atau "*ngajaga batur*", di wilayah DKI sekalipun nilai individualistis sudah mulai tinggi namun perilaku gotong royong masih ada dan dipelihara sebagian kelompok masyarakat. Pada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di wilayah-wilayah pedesaannya masih cukup kuat dan besar perilaku gotong royongnya seperti tercermin dalam pepatah "*sepi ing pamrih rame ing gawe*", sementara di Sulawesi Selatan pada konsep *Siri'* juga tercermin nilai gotong royong untuk menegakan harga diri. Oleh karena itu perilaku gotong royong ini harus terus ditingkatkan.

- 9) Nilai nilai agama yang dijadikan perilaku dan pedoman oleh masyarakat, menurut sebagian besar responden dapat dijadikan sebagai pedoman dan pendekatan dalam membangun kebersamaan dalam menanggulangi terorisme (Rata-rata = 3,7837. Std. Dev = 0,88053). Hasil penelusuran dari berbagai kitab suci umat beragama dan hasil wawancara pada 60 responden tokoh agama, dapat dikatakan setiap

kitab suci baik secara eksplisit maupun implisit memuat nilai-nilai hidup rukun sesama umat beragama, baik antar umat beragama maupun yang satu agama, seperti pada Agama Islam terdapat pada Surat Al Baqarah Ayat 256, Surat Al Kahfi Ayat 29.

- i. Faktor-faktor budaya tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Hasil uji statistik sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) nya sebesar 52,4%. Artinya apabila dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat serta agama dan peningkatan pemahaman masyarakat akan agama yang mereka anut masing-masing, serta mengembangkan dan melembagakan nilai-nilai budaya adiluhung maka aksi-aksi terorisme diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 52,4%.
- j. Namun demikian eksistensi nilai-nilai budaya tersebut pada saat ini tidak terpelihara dengan baik, sehingga keberadaannya tidak dipahami dan diketahui lagi oleh generasi berikutnya, bahkan mengalami pendangkalan makna. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yakni :
 - 1) Dalam berbagai kegiatan baik kemasyarakatan ataupun kenegaraan nilai-nilai budaya ini jarang disentuh bahkan diabaikan. Begitu pula dalam hal berperilaku politik nilai-nilai ini jarang disentuh.
 - 2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada masih gamang dalam mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, mengingat besarnya arus masuk kebudayaan luar yang lebih banyak mengusung nilai-nilai individualistis.
 - 3) Belum terbentuknya lembaga-lembaga kebudayaan yang dapat dianggap sebagai garda dan pemelihara nilai-nilai budaya tersebut.
 - 4) Miskinnya sosialisasi dan internalisasi pada masyarakat dan generasi berikutnya.
 - 5) Masyarakat belum memiliki lagi patronase tokoh baik pemimpin formal maupun informal yang dalam kehidupan sehari-harinya memperlihatkan sikap dan perilaku yang memegang prinsip-prinsip nilai budaya adiluhung tersebut.
- k. Polri dalam kerangka tugasnya sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya terorisme di seluruh wilayah Indonesia, selain harus mampu mengantisipasi prediktor penyebab dan faktor yang mempermudah terjadinya terorisme, juga dapat menggunakan nilai-nilai budaya yang adiluhung dalam penanggulangannya. sehingga

dapat tercapainya rasa aman dan damai seluruh masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia.

3. Rekomendasi :

- a. Mengingat hasil penelitian terdapat pertautan (interaksi) antara paham terorisme dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, maka sangat diperlukan strategi yang komprehensif yang memerlukan partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan secara sinergis untuk membangun daya tangkal dan daya tolak terhadap paham yang dikembangkan kelompok terorisme.
- b. Grand Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya membangun nilai-nilai budaya antara lain :
 - 1) Revitalisasi nilai-nilai budaya
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya
 - 3) Pelembagaan institusi Polri dan Masyarakat
 - 4) Reinterpretasi nilai budaya
 - 5) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya.
- c. Revitalisasi nilai-nilai budaya diarahkan pada diterapkannya nilai-nilai budaya dalam :
 - 1) Perilaku individu dalam keluarga atau dalam lingkungan keluarga.
 - 2) Setiap perilaku individu dalam masyarakat terutama untuk membangkitkan kegiatan bersama.
 - 3) Dalam tatanan pemerintahan baik pusat maupun daerah, baik sebagai seorang pimpinan dalam lingkungan kerja, maupun sebagai bawahan. Nilai-nilai harmonisasi harus tercermin dalam setiap hubungan atasan bawahan.
 - 4) Dalam tataran dan perilaku aparat penegak hukum, dan kelembagaan yudikatif
 - 5) Dalam tataran dan perilaku lembaga legislatif
 - 6) Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengedepankan/menghidupkan kembali idiom-idiom yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang harus dianut.
 - 7) Dalam tataran hubungan internasional, yang menunjang prinsip-prinsip bebas aktif.

Dalam konteks Kepolisian, revita-

lisasi nilai-nilai budaya berarti pula menumbuh-kembangkan nilai-nilai budaya dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, baik pada pelaksanaan fungsi preemtif, preventif, maupun penegakan hukum. Hal ini berarti pula harus mengubah pandangan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian bahwa masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek pengamanan dan penegakan hukum, melainkan sebagai subyek dari proses pengamanan dan penegakan hukum.

- d. Strategi *pemberdayaan* diarahkan pada dua subyek pembangunan keamanan, yakni Masyarakat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah strategi penguatan kemampuan masyarakat dalam membangun dirinya, dan menumbuhkan kembali jati dirinya sebagai subyek keamanan. Pemberdayaan masyarakat menyangkut pemberdayaan kelembagaan yang ada dalam masyarakat, dan menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang secara positif berguna bagi penangkalan, penolakan dan eliminasi paham-paham yang disebarkan kelompok terorisme. Sementara pemberdayaan Kepolisian diarahkan pada berfungsinya unit-unit yang melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan subyek keamanan diarahkan pada terbangun keterpaduan langkah dalam penanggulangan terorisme, antara Masyarakat dan Kepolisian (jejaring keamanan) sehingga masing-masing mempunyai peranan strategis.
- e. Untuk mewujudkan pemberdayaan subyek pembangunan keamanan tersebut, maka diperlukan *pelebagaan (institusionalisasi)* hubungan Kepolisian dengan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan keamanan. Konsep yang tepat dalam membangun hubungan masyarakat dengan Polri adalah pelebagaan konsep Perpolisian Masyarakat sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- f. Konsepsi Perpolisian masyarakat mengharuskan masyarakat dan Kepolisian mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban, serta masalah-masalah sosial;

juga dapat mendasarkan pada norma-norma sosial dengan mengindahkan norma hukum nasional dan HAM. Agar terdapat keselarasan dan tidak biasanya makna nilai-nilai sosial yang dijadikan pendekatan penyelesaian masalah gangguan terorisme, maka diperlukan *strategi reinterpretasi* terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat.

- g. Agar nilai-nilai budaya diluhung yang sangat penting peranannya dalam penanggulangan terorisme terinternalisasi pada setiap benak masyarakat Indonesia, pemerintah, dan aparat penegak hukum termasuk Polri maka diperlukan *diseminasi (sosialisasi), edukasi, dan publikasi* yang terprogram dan terlembaga.
- h. Pendekatan budaya dalam penanggulangan terorisme dalam konsepsi yang ideal memerlukan waktu yang lama, sementara penanggulangan terorisme tidak bisa ditunda-tunda, mengingat bahaya terorisme sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tahapan dalam mengimplementasi strategi tersebut dalam beberapa tahap, yakni :
- 1) Strategi interaksi budaya dalam penanggulangan terorisme jangka pendek (Tahun 2006-2009) diarahkan pada pemanfaatan potensi yang ada baik yang dimiliki Polri, Masyarakat, ataupun Pemerintahan.
 - 2) Strategi interaksi budaya dalam penanggulangan terorisme jangka menengah (Tahun 2010-2015) diarahkan pada upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam jangka pendek.
 - 3) Strategi interaksi budaya jangka panjang (Tahun 2016- 2025) dalam penanggulangan terorisme diarahkan pada upaya terlembaganya hubungan kemitraan Polri dengan masyarakat dan komponen lainnya, serta tertanamnya (*internalization*) nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. ***

